

**PEMBERDAYAAN POLITIK PENDIDIKAN
DAN PENGUATAN SOSIAL BUDAYA
DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL**

Yetri

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung

I. LATAR BELAKANG

Kita baru saja melewati tahun 2009 yang sarat dengan pentas tragis yang mengusung berbagai repertoar berbau fasis. Berbagai fenomena anomali sosial, politik, dan hukum seolah-olah telah menjadi bagian dari karakter bangsa ini. Tentu saja, situasi panggung semacam itu menimbulkan beragam respon dari penonton (masyarakat) yang memiliki karakter beragam pula. Ada yang puas dan tepuk tangan, ada juga yang mengernyitkan dahi, mengelus dada, bahkan tak sedikit yang garang berteriak di jalanan. Serentetan adegan dan peristiwa yang sarat anomali itu menemukan klimaksnya ketika terjadi ontran-ontran hukum yang mengabaikan rasa keadilan. Rakyat yang geram dan marah terhadap praktik hukum yang amburadul menumpahkan kegelisahannya melalui “parlemen online” dan “parlemen jalanan” sebagai protes terhadap aparat penegak hukum yang dinilai mulai kehilangan kearifan dan ketidakberdayaan para wakil rakyat dalam menyuarakan rasa keadilan.

Yang tak kalah tragis tentu praktik politik dan demokrasi yang menampilkan wajah homo homini lupus. Mereka menjadi serigala yang tega memangsa sesamanya. Kecerdasan dan tingginya pengetahuan bukan dimanfaatkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, melainkan justru untuk melestarikan dan mengembangkan suasana fasis yang menguntungkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Etika dan fadsun politik telah berubah menjadi retorika dan slogan belaka. Yang menang selalu menepuk dada dan tampil sebagai juara, sedangkan yang kalah diposisikan sebagai pecundang. Mungkin ada benarnya kalau Michel Foucault bilang bahwa pengetahuan yang jatuh di tangan penguasa lalim dan tak berperasaan, akan menjadi mesin pembunuh yang mematikan¹.

Pertanyaannya sekarang, apakah sesungguhnya yang menjadi pemicu lahirnya situasi yang sarat anomaly semacam itu ?. Dalam pandangan awam, situasi yang sarat anomaly semacam itu tak lepas dari warisan dan gaya kepemimpinan yang lengah dan abai terhadap persoalan-persoalan kebudayaan dalam dinamika pembangunan berbangsa dan bernegara. Dengan dalih demi mengejar pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, pendidikan kemanusiaan –sebagai bagian penting dalam sebuah kebudayaan– perlahan-lahan digusur, untuk selanjutnya dikubur tanpa nisan dalam ranah pendidikan kita.

Pendidikan tidak diarahkan untuk memanusiaan manusia secara utuh, lahir dan batin, tetapi lebih diorientasikan pada hal-hal yang bercorak materialistis, ekonomis, dan teknokratis; kering dari sentuhan nilai moral,

¹ Sen, Amartya. (2008) 'Pendidikan dan Demokrasi, *The Indonesian Prospect Online*, <http://www.prospect.org/print/V13/1/sen-a.html>

kemanusiaan, dan kemuliaan budi. Pendidikan lebih mementingkan kecerdasan intelektual, akal, dan penalaran, tanpa diimbangi dengan intensifnya pengembangan kecerdasan hati nurani, emosi, dan spiritual. Imbasnya, apresiasi keluaran pendidikan terhadap keagungan nilai humanistik, keluhuran dan kemuliaan budi jadi nihil. Mereka jadi kehilangan kepekaan nurani, cenderung bar-bar anarkhis, besar kepala, dan mau menang sendiri.

Iklim pendidikan kita yang kering dari sentuhan nilai kemanusiaan semacam itu, disadari atau tidak, telah melahirkan manusia-manusia berkarakter hedonis, penjilat, hipokrit, arogan, dan miskin kearifan. Tak berlebihan kalau (alm.) Rama Mangunwijaya dengan nada sinis pernah menyatakan bahwa angkatan sekarang mengalami kemunduran yang sangat parah dalam pendidikan berpikir nalar eksploratif dan kreatif, sehingga menumbuhkan kultur pikir dan cita rasa yang sempit dan dangkal yang memperlambat pendewasaan diri. Padahal, idealnya, rasionalitas harus dikemudikan ke tingkat yang lebih komprehensif, yakni kearifan. Kearifan pun harus memiliki dimensi rasionalitas yang tinggi. Emosi, perasaan, atau pandangan subjektif dalam diri manusia, tegas Rama Mangun, dapat diibaratkan seperti energi yang memberi daya gerak kepada karya manusia. Sedangkan rasio atau nalar ibarat kemudi atau setir, sedangkan kearifan adalah nahkodanya².

Puncak degradasi kebudayaan pun terjadi ketika terjadinya “penceraian” antara kebudayaan dari dunia pendidikan. Menteri Pariwisata,

² Bambang Putra: Pendidikan Dalam Perspektif Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya. <http://faculty.ed.uiuc.edu/burbules/ncb/papers/global.html/2007>

Seni, dan Budaya pun terbentuk. Praktis, dunia pendidikan yang sejatinya tak bisa dipisahkan dari ranah pendidikan pun resmi bercerai dengan kebudayaan. Oleh penguasa, budaya tidak lagi dipahami sebagai sebuah entitas pencarian nilai-nilai kedalaman dan kesejatian hidup, tetapi lebih diorientasikan bagaimana agar kita bisa hidup dari sebuah kebudayaan. Dengan kata lain, bangsa kita tidak berupaya untuk “menghidupi” kebudayaan, tetapi justru bagaimana caranya agar kita bisa “hidup” dari kebudayaan itu. Maka, lahirlah produk-produk budaya kemasan baru yang semata-mata dimanfaatkan untuk mendongkrak devisa negara; bukan untuk meninggikan harkat dan kemuliaan sebuah bangsa yang beradab dan berbudaya.

Di samping kondisi yang di aparkan di atas, kondisi politik Indonesia juga disinyalir banyak kalangan masih dalam proses belajar, yang diperparah dengan moralitas para aktor politik menyiratkan belum pahamnya warganegara terhadap pokok-pokok politik yang sesungguhnya. Terlebih jika kondisi ini dikaitkan dengan pola dan tuntutan demokrasi, Indonesia masih jauh dari gambaran negara demokrasi yang sesungguhnya. Kondisi ini dapat diteropong melalui banyak dimensi, salah satunya adalah pendidikan. Gambaran yang terbentuk di benak masyarakat tentang politik adalah sesuatu yang kerap diselesaikan dengan cara yang tidak masuk akal, menjenuhkan, monopoli sekelompok orang dan seolah sama dan sebangun dengan permainan busuk dan kotor. Padahal, sesungguhnya politik merupakan bagian dari strategi kehidupan untuk mencapai tujuan. Jika dilakukan secara benar, jujur, cerdas dan elegan, pasti akan mendatangkan kemaslahatan dan kesejahteraan buat rakyat.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan politik bagi warganegara, anak negeri perlu dibuat melek politik. Artinya, mereka perlu belajar dan memahami berbagai persoalan yang sedang dihadapi bangsanya, melalui pembelajaran yang dialogis dan interaktif. Pola pendidikan ini tidak perlu mewah atau menjadikannya sebagai materi pembelajaran tersendiri, yang ditekankan adalah pendidikan politik yang diaplikasikan bukan untuk propaganda politik praktis yang mengarah pada proses pembusukan intelektual, melainkan pendidikan politik yang sehat dan mencerahkan. Cukup dilakukan dengan menanamkan nilai kearifan (budaya dan etika) politik ke dalam ranah pemikiran siswa, sehingga kelak mereka mampu menjadi aktor politik cerdas yang tidak mudah melakukan tindakan merugikan bagi bangsa dan negara.

Dalam konteks demikian, dibutuhkan penanaman nilai budaya dan etika politik secara benar melalui pendidikan. Sesungguhnya, hancurnya tatanan politik di negeri ini merupakan imbas minimnya dunia pendidikan politik dalam menyentuh nilai kearifan politik. Selama di bangku sekolah siswa nyaris tidak mendapatkan pendidikan politik secara benar. Mereka belajar politik secara langsung di tengah kehidupan masyarakat yang penuh anomali politik. Imbasnya ketika terjun ke ranah politik praktis, mereka menjadi aktor yang lalai terhadap nilai budaya dan etika politik yang mengedepankan nilai kejujuran, kearifan dan kesantunan.

Berpijak dari uraian latar belakang dan untuk memfokuskan kajian makalah ini, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemberdayaan pendidikan politik dalam pembangunan pendidikan nasional ?

2. Bagaimana upaya penguatan sosial budaya dalam pembangunan pendidikan nasional ?

II. PEMBAHASAN

1. Pemberdayaan Pendidikan Politik dalam Pembangunan Pendidikan Nasional

Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik juga dapat dipandang sebagai sebagai upaya penguatan social. Pandangan tersebut menekankan pada aspek jaringan hubungan sosial yang diikat oleh kepemilikan informasi, rasa percaya, saling memahami, dan kesamaan nilai, dan saling mendukung. Modal sosial akan semakin kuat apabila sebuah komunitas atau organisasi memiliki jaringan hubungan kerjasama, baik secara internal komunitas, atau hubungan kerjasama yang bersifat antar komunitas. Jaringan kerjasama yang sinergis merupakan modal sosial dan akan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat³.

Pendidikan politik, merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada warganegara dimana keterlaksanaannya sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan di mana individu berada, selain itu, juga ditentukan oleh interaksi pengalaman serta kepribadian seseorang. Disisi lain kegiatan ini juga dipandang sebagai proses yang berlangsung lama dan rumit yang dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi di antara kepribadian individu dengan pengalaman politik yang relevan yang memberi bentuk terhadap tingkah laku politiknya. Pengetahuan, nilai dan sikap yang

³ Mulawarman Husen: Krisi dan Politik Pendidikan, KOMPAS, 1 Desember 2000

diperoleh seseorang itu membentuk satu layar persepsi, melalui mana individu menerima rangsangan politik yang akan menentukan bentuk etika politik seseorang yang berkembang berangsur-angsur.

Jadi, pendidikan politik adalah proses dengan mana individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai dan sikap terhadap sistem politik masyarakat.⁴ Namun, peristiwa ini tidak menjamin bahwa masyarakat mengesahkan sistem politiknya, sekalipun hal ini mungkin bisa terjadi, sebab bisa saja menyebabkan pengingkaran terhadap legitimasi. Tetapi, apakah akan menuju kepada stagnasi atau perubahan, tergantung keadaan yang menyebabkan pengingkaran. Apabila tidak ada legitimasi disertai dengan sikap bermusuhan yang aktif terhadap sistem politik, maka perubahan mungkin terjadi. Sebaliknya, jika legitimasi dibarengi dengan sikap apatis terhadap sistem politik, bukan tak mungkin menghasilkan stagnasi. Dengan demikian keberadaan pendidikan politik menjadi sangat urgen, karena (1) secara fundamental merupakan proses hasil belajar; (2) memberikan indikasi hasil belajar tingkah laku individu dan kelompok yang berkenaan dengan pengetahuan, informasi, nilai dan sikap; (3) dapat dilakukan sepanjang hidup; dan (4) merupakan prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial yang secara implisit dan eksplisit memberikan penjelasan tingkah laku sosial.⁵

Tahapan pendidikan politik sendiri dapat dilakukan melalui keluarga, sekolah dan partai politik.⁶ Masalahnya adalah sosiologi politik dalam masyarakat berkembang dan berubah dengan cepat. Sifat pendidikan politik

⁴ Kartini Kartono. *Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. (Bandung: Mandar Maju, 1989).

⁵ Kartini Kartono, 1989, *Ibid*.

⁶ Tilaar. *Kekuasaan dan Pendidikan: manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

yang bervariasi menurut waktu serta yang selalu menyesuaikan dengan lingkungan yang memberinya kontribusi, berkaitan dengan sifat pemerintahan dan derajat serta sifat perubahan. Semakin stabil pemerintahan, semakin terperinci agensi-agensi utama dari pendidikan politik. Sebaliknya, semakin besar derajat perubahan, semakin tersebarlah agensi utama dari pendidikan politik.

Dalam realitas kehidupan, pola pendidikan politik juga mengalami perubahan seperti berubahnya struktur dan kultur politik. Perubahan tersebut menyangkut perbedaan tingkat keterlibatan dan derajat perubahan dalam sub sistem masyarakat yang beraneka ragam. Sehingga dikatakan bahwa pendidikan politik bisa bersifat *manifes* dan *laten*. Pendidikan politik yang bersifat *manifes* berlangsung dalam bentuk transmisi informasi, nilai atau perasaan terhadap peran, input dan output mengenai sistem politik. Sedangkan, pendidikan politik *laten* berlangsung dalam bentuk transmisi informasi, nilai atau perasaan terhadap peran, input dan output mengenai sistem sosial yang lain seperti keluarga.

Membangun sebuah kultur demokratis dari pola pendidikan politik yang diterapkan dapat dilakukan dengan menggelar strategi kebudayaan. Konkretnya, membangun sistem pendidikan politik yang menjadikan prinsip kemandirian dan nalar publik sebagai pijakan konseptual, fokus pada penciptaan individu yang otonom dan kritis dalam daya pertimbangan. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan konsep pendidikan dengan menekankan pada proses *learning to know, learning to do, learning to be and learning to*

live together.⁷ Menerapkan empat pilar tersebut dalam proses pendidikan politik berarti memungkinkan peserta didik dapat menguasai cara memperoleh pengetahuan, berkesempatan menerapkan pengetahuan yang dipelajarinya, berkesempatan berinteraksi secara aktif dengan sesama sehingga dapat menemukan dirinya.⁸ Proses strategi pedagogis ini tentu membidik target jangka panjang yang menentukan cerah-tidaknya masa depan demokrasi di negeri ini.

Proses pendidikan politik kepada warga masyarakat akan lebih bermakna jika dalam proses tersebut individu berhasil dibimbing untuk mengenal dan mengembangkan diri dan lingkungannya dalam konteks politik. Untuk itu perlu penekanan proses pada beberapa wilayah makna yang akan menuntun pemahaman individu terhadap hakekat perkembangan peradaban yang dihadapi. Wilayah makna yang dimaksud adalah *symbolic, empirics, synnoetics, aesthetics, ethics and synoptic*.⁹ Pendidikan ini, jika diselenggarakan dengan baik, akan menghasilkan generasi yang mampu berpikir secara sistematis, mengenal dan memahami aneka persoalan empiris yang ada di masyarakatnya, memiliki rasa keindahan, memiliki kepekaan sosial, secara sukarela taat kepada norma dan mampu berpikir secara reflektif dan integratif.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa peran pendidikan politik dalam pembangunan pendidikan nasional sangat besar dan signifikan yang

⁷ Jacques Delors et. Al. Learning: The Treasure Within. *Report to UNESCO of The International Commission on The Twenty First Century*. (UNESCO: Paris, 1996).

⁸ Soedijarto. Kurikulum, Sistem Evaluasi dan Tenaga Kependidikan Sebagai Unsur Strategis,. *Makalah*. Jurnal Pendidikan Penabur - No.03 / Th.III / Desember 2004.

⁹ Philip Phenix. *Realms of Meaning: A Pilosophy of Curriculum for General Education*. (New York: McGrow-Hill Book, 1964).

diharapkan mampu membentuk karakter dan mental generasi muda, melakukan transformasi budaya dalam sistem dan kondisi politik yang kondusif. Suatu tuntutan yang pada hakekatnya telah digariskan oleh para pendiri Republik Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan pendidikan dan kebudayaan nasional, dengan mengedepankan budaya dan etika politik yang patut dibanggakan.

Terkait dengan upaya pemberdayaan dan pola pendidikan politik, dalam hubungan ini diperlukan suatu pola pendidikan sosial politik yang baru. Pola-pola indoktrinasi dan mematikan partisipasi masyarakat adalah bertentangan dengan visi dan misi pembangunan pendidikan nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas, sejahtera dan berkeadilan.

Salah satu cara dan pola yang dapat digunakan untuk upaya pemberdayaan pendidikan politik ini adalah melalui pendidikan dan pengajaran, misalnya melalui *civic education*¹⁰. Sudah tentu *civic education* yang baik tidak bersifat indoktrinasi yang cenderung menghalalkan segala bentuk dalam mengagungkan bangsa sendiri. *Civic education* yang baik adalah pendidikan yang bukan hanya menunjukkan nilai positif yang dimiliki oleh suatu bangsa tetapi juga menunjukkan nilai negatif yang merusak citra bangsa. Dengan demikian kita sudah membangkitkan semangat *inward looking nasionalism*, yang berani mengadakan koreksi terhadap kelemahan diri sendiri. Nasionalisme yang sehat sebagai modal budaya dan etika politik hanya dapat dikembangkan melalui proses pendidikan dengan kondisi politik yang mendukung, sehingga proses pendidikan tersebut dapat dijadikan

¹⁰ Tilaar. *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

sebagai teladan bagi generasi berikutnya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Dalam *Civic education* terkandung makna sosialisasi, diseminasi dan aktualisasi konsep, nilai, sistem, budaya, serta praktik demokrasi dan keadaban.¹¹ Postulat yang berada di balik penerapan pendidikan kewargaan, antara lain bahwa pemeliharaan tradisi demokrasi tidak bisa di wariskan begitu saja, tetapi harus diajarkan, disosialisasikan dan diaktualisasikan kepada generasi muda melalui lembaga pendidikan. Dan dewasa ini pendidikan kewargaan sudah mendesak segera dilakukan, mengingat masa transisi menuju demokrasi mengalami beragam patologi sosial yang terjadi di tengah masyarakat seringkali kontra-produktif dengan upaya penegakan demokrasi itu sendiri. Misalnya; hancurnya nilai demokrasi dalam masyarakat, memudarnya kehidupan kewargaan dan nilai komunitas, kemerosotan nilai toleransi, memudarnya nilai kejujuran, kesopanan dan rasa tolong menolong, melemahnya nilai dalam keluarga, maraknya praktik KKN dalam pemerintahan, kerusakan sistem dan kehidupan ekonomi, serta pelanggaran terhadap nilai kebangsaan itu sendiri.

Civic education merupakan sarana pendidikan yang dibutuhkan oleh negara demokrasi baru untuk melahirkan generasi yang menguasai pengetahuan, mengerti nilai, dan memiliki *skill* yang diperlukan untuk mengaktualisasikan, memberdayakan dan melestarikan demokrasi. Transisi demokrasi ini di Indonesia memerlukan reformasi dalam tiga bidang secara simultan yaitu reformasi sistem (*constitutional reforms*) menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar dan perangkat legal sistem

¹¹ Tilaar. *Kekuasaan dan Pendidikan*,. *Op.cit*.

politik. *Kedua*, reformasi kelembagaan (*institutional reforms and empowerment*) menyangkut pengembangan dan pemberdayaan lembaga politik. *Ketiga*, pengembangan kultur atau budaya politik (*political culture*) yang lebih demokratis.

Kepemimpinan dalam masyarakat, juga dapat menjadi sarana penting dalam pendidikan politik. Namun sejalan dengan semakin meningkatnya peran serta masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan, harus disertai dengan kepemimpinan masyarakat yang lebih bersih dan terbuka. Stigma mengenai moral pemimpin-pemimpin yang hanya mementingkan diri sendiri telah menyebabkan hilangnya pusat-pusat panutan nilai dari masyarakat dan legitimasi pemimpin seperti itu dengan sendirinya akan merosot bahkan hilang sama sekali.

Di samping itu, tentang pola pendidikan politik ini secara gambling dalam UU Nomor 31/2002 itu menyatakan, parpol memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat; perekat persatuan dan kesatuan bangsa; penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi masyarakat; partisipasi politik warga negara; dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan publik. Website Partai politik (parpol) atau kader parpol harus bisa menjadi sekolah politik bagi rakyat. Tujuannya, agar rakyat memiliki pengetahuan yang menyeluruh tentang kehidupan politik yang sehat dan demokratis. Namun, persoalan mendasar yang kita hadapi saat ini adalah Parpol, kader partai atau para caleg parpol belum mampu memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Pada akhirnya sebagian besar rakyat menjadi tidak melek

politik. Jika konsisi seperti ini terus terjadi, perkembangan demokrasi di Indonesia akan berjalan secara perlahan dan tidak pasti.

2. Upaya Penguatan Sosial Budaya dalam Pembangunan Pendidikan Nasional

Kontes SEO bertema Mengembalikan Jati Diri Bangsa melalui reformasi cultural yang digelar Berita Jitu.com¹². Sungguh menarik diikuti, bukan lantaran SEO-nya, melainkan temanya yang memang menantang untuk dikaji dan didiskusikan. Secara jujur, kita mesti mengakui, bahwa jati diri bangsa kita belakangan ini memang menampilkan potret buram. Nilai-nilai kesejatian diri bangsa yang dulu terekspresikan melalui sikap ramah, santun, setia kawan, gotong royong, dan sikap-sikap fatsun kehidupan yang lain, makin memudar di tengah meruyaknya sikap pragmatis, materialistis, konsumtif, dan hedonis. Sikap ke-kita-an telah berubah menjadi sikap ke-kami-an, bahkan dinilai telah terdegradasi ke dalam sikap ke-“aku”-an. Dalam konteks demikian, tidak berlebihan apabila perlu ada upaya serius untuk mengembalikan jati diri bangsa yang dinilai telah hilang itu.

Lantas, bagaimana dengan penumbuhan bidang sosial dan kebudayaan? Dengan nada sedih harus dikatakan bahwa budaya merupakan ranah yang tak tersentuh oleh reformasi, bahkan semenjak negeri ini berada di atas tungku kekuasaan Orde Baru. Kebudayaan benar-benar menjadi sebuah Indonesia yang tertinggal. Ironisnya, kebudayaan kita justru

¹² Audina Meryani, *Kembalikan Jati Diri Bangsa* <http://id.wordpress.com>, Jakarta, 13 April 2010

diceraihan dari ranah pendidikan. Kebudayaan harus “menikah” dengan kepariwisataan yang jelas-jelas lebih diorientasikan pada politik pencitraan dan dunia industri.

Sebagaimana dikemukakan oleh Andreas Eppink dalam ¹³, kebudayaan itu sendiri mengandung keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur sosial, religius, serta pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Dalam pandangan J.J. Hoenigman¹⁴, kebudayaan bisa berwujud gagasan, aktivitas (tindakan), dan artefak (karya). Ketiga wujud ranah kebudayaan inilah yang akan sangat menentukan peradaban sebuah bangsa. Namun, ketika kebudayaan dipahami sebagai bagian dari politik pencitraan dan industri, disadari atau tidak, hancurlah basis-basis kebudayaan yang akan menjadi penyangga peradaban bangsa.

Agaknya, bangsa kita memang telah “ditakdirkan” untuk menjadi bangsa pelupa. Kita (nyaris) tak pernah belajar pada pengalaman-pengalaman masa silam. Yang sering kita ingat, bukan esensinya, melainkan asesorisnya. Kita lupa bahwa pada awal-awal pergerakan nasional, para pendiri negeri ini dengan amat sadar menyentuh persoalan kebudayaan sebagai basis perubahan. Kebudayaanlah yang telah menyatukan berbagai kelompok etnis dan suku ke dalam sebuah wadah, sehingga mampu menorehkan tinta sejarah melalui Gerakan Budi Utomo (1908) yang dikokohkan kembali melalui Sumpah Pemuda (1928). Berkat sentuhan kebudayaan, mimpi “Indonesia Baru” yang merdeka dan berdaulat akhirnya menjadi sebuah kenyataan.

¹³ Piliang, *Hiper Reality Kebudayaan*, LKiS, Yogyakarta. 1999

¹⁴ Piliang. *ibid*.....

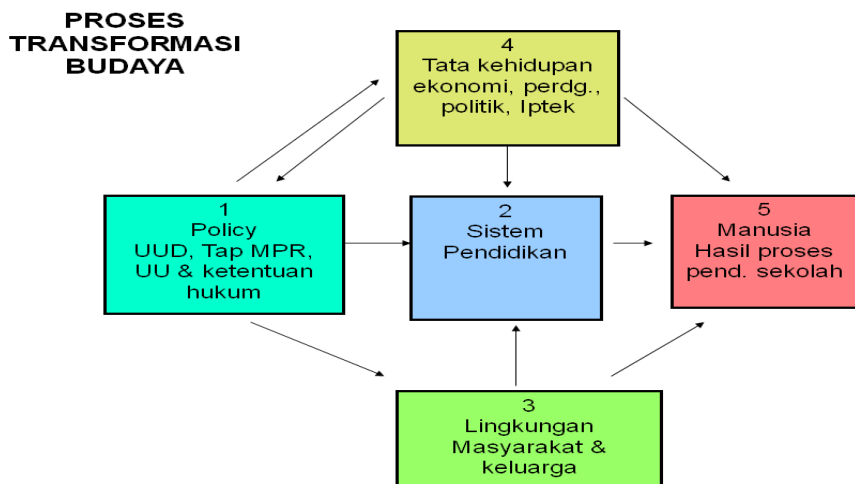
Penumbuhan rasa sensitivitas sosial dan budaya agaknya akan terus menjadi sebuah Indonesia yang tertinggal jika tidak ada “kemauan politik” untuk menyentuhnya ke dalam ranah perubahan. Satu dekade reformasi seharusnya sudah mampu memberikan kemaslahatan publik dalam menggapai kehidupan yang lebih baik. Telinga kita sudah demikian jenuh mendengar bahasa politik dan ekonomi yang tak henti-hentinya mengedepankan “siapa yang menang” dan “apa untungnya”. Sudah saatnya kita memperluas makna perubahan dengan menyentuh akar-akar sosial dan kebudayaan dengan mengedepankan pertanyaan “apa yang benar”.

Menyadari terjadinya perubahan-perubahan yang begitu mendasar dalam kehidupan di tengah masyarakat, maka lagi-lagi perlu dilakukan upaya penguatan sosial budaya, agar kehidupan sosial budaya benar-benar dapat menopang pembangunan pendidikan yang lebih bermartabat. Salah satu upaya mendasar yang dapat dilakukan adalah melalui jalur persekolahan. Sekolah disiapkan untuk menjawab tantang perubahan tersebut sesuai dengan fungsinya. Perubahan-perubahan itu antara lain tercermin dalam perubahan dan pembaharuan kurikulum dan sistem pendidikan. Peralihan dari jaman ke jaman memerlukan berbagai perubahan kurikulum sesuai dengan filsafat bangsa dan paradigma dominan yang dianut. Jadi, dengan kata lain, perubahan menuju pembaharuan dalam pendidikan sangat tergantung kebijakan yang diambil oleh negara. Tetapi, di Indonesia hal semacam itu belum benar-benar dipikirkan.¹⁵

¹⁵ Soedijarto, (2008). *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Jakarta : Kompas.

Sebagaimana menurut Soedijarto¹⁶ bahwa *civilization is more than culture*. Oleh karena itu sekolah hendaknya berfungsi sebagai pusat pembudayaan. Di sekolah diharapkan akan terjadi proses membudayakan hal-hal yang baik melalui sebuah rangkaian proses sadar dan bermakna. Guru hendaknya melatih siswa didik untuk berpikir tentang bagaimana berpikir, bersikap, bertindak dan bertanggung jawab atas tindakannya sesuai peradaban yang dianutnya.

Sebagaimana dikutip dari makalah perkuliahan¹⁷, pendapat di atas selanjutnya dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:



Pendapat di atas sejalan dengan pandangan Sosiologi Pendidikan bahwa pendidikan adalah suatu institusi pengkonservasian yang berupaya

¹⁶ Soedijarto (2003) *Pendidikan nasional sebagai Proses Transformasi Budaya*. Jakarta

¹⁷ Abd. Kadir dkk. *Pengaruh Kondisi Sosial Budaya Terhadap Pendidikan dan Peranan Pendidikan dalam Pembangunan Kebudayaan Nasional*, Makalah Diskusi Perkuliahan S3 UNJ, 2010

menjembatani dan memelihara warisan budaya suatu masyarakat yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mengikat seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melihat perkembangan masyarakat yang sering dilanda perubahan secara tiba-tiba, maka kemungkinan terjadinya dampak negatif yang akan menggejala ke dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dihindari kehadirannya. Gejala ketimpangan budaya atau *cultural lag*, harus dapat diminimalisasi pengaruhnya ke dalam tatanan kehidupan masyarakat. Untuk itu sebagai lembaga yang berfungsi menjaga dan mengarahkan perjalanan masyarakat, pendidikan harus dapat menangkap potensi kebutuhan masyarakat

Selain itu, sebagai langkah penguatan dalam kehidupan social budaya msasyarakat, program dan kegiatan yang esensinya lebih kepada menumbuhkembangkan kehidupan sosial budaya yang relevan dengan nilai-nilai luhur bangsa, perlu dikedepankan dan menjadi prioritas pemerintah dengan melibatkan secara partisipatif seluruh lapisan masyarakat dengan etnis dan buadaya lokal yang berbeda.

III. PENUTUP

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Bahwa persoalan pendidikan politik masyarakat perlu dipersiapkan dan dirancang sedemikian rupa baik melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal, guna mencapai tujuan pembangunan pendidikan nasional Pendidikan. Yaitu membentuk karakter dan mental generasi muda agar dapat melakukan transformasi budaya dalam upaya membina sistem dan kondisi politik yang kondusif dengan mengedepankan nilai-

nilai budaya dan etika yang patut dibanggakan. Dan mengembangkan pendidikan politik tidak hanya menjadi *banking-process*, namun menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, humanis, tidak antirealitas, mengutamakan proses, penyalarsan hak dan tanggungjawab.

1. Upaya untuk menumbuhkembangkan kehidupan sosial budaya yang yang sehat sesuai dengan jati diri dan nilai-nilai budaya bangsa, ditengah masyarakat yang berhadapan dengan perubahan yang begitu cepat, maka lagi-lagi perlu dilakukan upaya penguatan sosial terutama melalui pendidikan masyarakat, sehingga diharapkan penguatan aspek sosial budaya tersebut diharapkan dapat dapat menopang pembangunan pendidikan nasional yang lebih bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Kadir dkk. *Pengaruh Kondisi Sosial Budaya Terhadap Pendidikan dan Peranan Pendidikan dalam Pembangunan Kebudayaan Nasional*, Makalah Diskusi Perkuliahan S3 UNJ, 2010

Audina Meryani, *Kembalikan Jati Diri Bangsa*
<http://id.wordpress.com> , Jakarta, 13 April 2010

Bambang Putra: *Pendidikan Dalam Perspektif Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya*[i]<http://faculty.ed.uiuc.edu/burbules/ncb/papers/global.html/2007>

Jacques Delors et. Al. *Learning: The Treasure Within. Report to UNESCO of The International Commission on The Twenty First Century*. UNESCO: Paris, 1996

Kartini Kartono. *Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Mandar Maju, 1989.

Mulawarman Husen: *Krisi dan Politik Pendidikan*, KOMPAS, 1 Desember 2000

Philip Phenix. *Realms of Meaning: A Pilosophy of Curriculum for General Education*. New York: McGrow-Hill Book, 1964

Piliang, Yasraf Amir, *Hiper Reality Kebudayaan*, LK iS, Yagjakarta. 1999

Sen, Amartya. (2002) *'Pendidikan dan Demokrasi: The Indonesian Prospect Online*, <http://www.prospect.org/print/V13/1/sen-a.html>

Soedijarto. *Kurikulum, Sistem Evaluasi dan Tenaga Kependidikan Sebagai Unsur Strategis.*, *Makalah*. Jurnal Pendidikan Penabur - No.03 / Th.III / Desember 2004.

Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Jakarta Kompas, 2008.

Soedijarto, *Pendidikan nasional sebagai Proses Transformasi Budaya*. Jakarta, 2003

Tilaar. *Kekuasaan dan Pendidikan: manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003

Tilaar. *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000